

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
LAYANAN COLOCATION
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PUSAT DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2011

Aturan-aturan Layanan Co-Location Kementerian Kesehatan

I. Pendahuluan

Aturan-aturan layanan co-location merupakan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh pengguna layanan co-location di Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI. Aturan ini dapat mengalami revisi apabila dalam pelaksanaannya atau dalam pengembangan sistem terdapat perubahan.

II. Definisi

- **Pengguna/User**

Adalah pihak yang mendapatkan layanan co-location hosting. Pengguna yang diijinkan adalah unit-unit serta UPT-nya yang ada dilingkungan Kementerian Kesehatan.

- **Pengelola**

Adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan sistem hosting di Kementerian Kesehatan. Pengelola yang dimaksud adalah Unit Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

- **Penanggung Jawab Administratif**

Adalah Pimpinan organisasi/kegiatan pihak pengguna /user layanan hosting. Untuk unit kerja, penanggung jawabnya adalah pimpinan unit kerja yang membawahi organisasi tersebut.

- **Penanggung Jawab Teknis**

Adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis atas hosting yang bersangkutan dan sebagai kontak teknis yang akan dihubungi oleh pengelola apabila ada pemberitahuan maupun masalah yang berhubungan dengan teknis. Penanggung jawab teknis merupakan orang yang ditunjuk oleh penanggung jawab administratif untuk mengelola dan memelihara layanan hosting.

III. Aturan-aturan layanan Co-Location

Syarat –syarat

1. Pihak pengguna setuju terhadap fitur-fitur yang disediakan.
2. Dukungan teknis untuk pengguna diberikan selama jam dan hari kerja melalui email, telepon ataupun kunjungan dari pihak pengguna.
3. Pemberian nama Domain harus mewakili unit kerja yang bersangkutan.
4. Pendaftaran domain dilakukan atas nama Unit Kerja.
5. Masa berlaku layanan hosting untuk Unit Kerja bersifat permanen, atas kesepakatan dan persetujuan pihak Pusdatin.
6. Penamaan dan pengelolaan domain sepenuhnya menjadi wewenang penanggung jawab administratif. Dalam pengoperasian sehari-hari, "penanggung jawab administratif" diwakili oleh "penanggung jawab teknis".
7. Pengelola tidak bertanggung jawab dan tidak berperan selain dari pencatatan atas pendelegasian nama dari domain yang diminta.
- 8. Menggunakan server tidak untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia atau hukum yang ditetapkan di wilayah hukum tempat tinggal anda. **Pusdatin tidak bertanggung jawab atas isi content homepage, pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas isi homepage.****
9. Setiap unit kerja diharapkan memiliki Server dengan model minimal Rackmounted untuk semua merk Server.
10. Spesifikasi hardware harus dikoordinasikan dengan tim teknis dari Pengelola.
11. Setiap unit kerja yang membangun website dengan software proprietary harus berlisensi/legal
12. Pengelola diberi kewenangan untuk melakukan troubleshooting apabila terjadi gangguan pada aliran listrik yang menyebabkan tidak berjalannya website pada unit kerja bersangkutan.

13. Pihak PUSDATIN berhak penuh untuk melakukan tindakan yang perlu, seperti mematikan server, apabila terindikasi adanya hacker yang merubah tampilan atau isi website

Tanggung Jawab Pihak Pengguna

1. Pemilik domain mempunyai hak penuh untuk memodifikasi websitenya masing-masing dengan memperhatikan aturan dan prosedur yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Kementerian Kesehatan. Hal-hal yang belum ditetapkan diatas akan ditetapkan di lain waktu. Perubahan peraturan/ketetapan akan diberitahukan melalui kedua alamat email penanggung jawab hosting.
3. Pihak pengguna bertanggung jawab atas kerahasiaan username dan password yang dipegang.
4. Pihak pengguna disarankan untuk memilih password yang mengacu kepada faktor keamanan dan menggantinya setiap periode tertentu

Tanggung jawab Pengelola

1. Kami akan siapkan IP Publik yang hanya diperuntukkan satu bagi setiap unit kerja setingkat eselon I sebagai sub domain dari pengalamatan website yang bersangkutan
2. Proses setting/konfigurasi jaringan hanya dilakukan oleh Pusdatin dengan didampingi tim dari unit kerja yang bersangkutan.
3. Tidak bertanggung jawab atas rusak/hilangnya data pihak pengguna secara disengaja atau tidak sengaja yang disebabkan oleh pihak manapun.
4. Mempunyai kewenangan untuk memantau dan memonitor isi website dengan alasan yang kuat dan jelas.
5. Tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada username dan password pengguna, termasuk didalamnya apabila diketahui oleh pihak yang tidak memiliki hak sebagai pengguna.